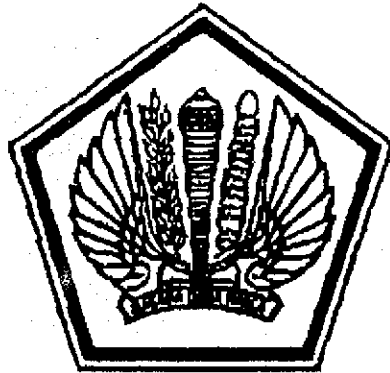


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
NOMOR : 01/BP/2001**

TENTANG

**VISI, MISI DAN STRATEGI
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN**

**BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
2001**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
NOMOR : KEP-01/BP/2001**

TENTANG

VISI, MISI DAN STRATEGI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan kunci dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam untuk memenuhi perubahan lingkungan baik secara global dan nasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu penyamaan pandangan dan nilai yang dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi pegawai Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-449/KMK.08/1979 tanggal 23 Oktober 1979 tentang Pola Induk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-100/KMK.1/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
- Memperhatikan** : Pengarahan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan pada tanggal 15 Desember 1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN TENTANG VISI, MISI DAN STRATEGI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Visi Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan adalah Menjadi Pusat Unggulan Bertaraf Internasional dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Misi Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan adalah :

1. Diklat dan Pengembangan
Meningkatkan kualitas manusia di bidang Keuangan Negara melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
2. Pengkajian
Mengembangkan tradisi pengkajian di bidang pendidikan dan pelatihan yang dapat diandalkan.
3. Organisasi Belajar
Senantiasa memperbaharui diri melalui proses organisasi belajar (Learning Organization) sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal.
4. Sosial
Berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat yang sadar keuangan negara.

Pasal 3

Strategi Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk mencapai visi dan misi adalah seperti yang termuat dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Badan/Kapusdiklat/Direktur STAN;
5. Para Kepala Balai Diklat Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2001

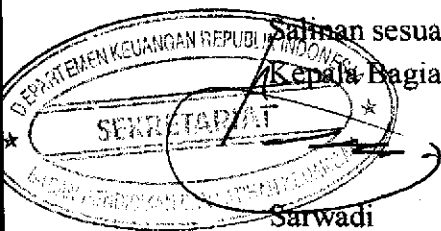
Kepala Badan

ttd

Hartadi Sutomo
NIP 060030223

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Sarwadi
NIP 060042143



No.	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					Kebijakan	Program	Kegiatan / Aktivitas
					6	7	8
1	Menjadi pusat unggulan bertaraf internasional dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang keuangan negara	Diklat dan Pengembangan meningkatkan kualitas manusia di bidang keuangan negara melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan	1. meningkatkan kualitas program diklat termasuk program diploma	2. Terwujudnya pemufakatan kebijakan diklat di bidang keuangan negara	1. Mendesentralisasikan penyelenggaraan diklat 2. Mengidentifikasi peluang penyelenggaraan diklat jarak jauh 3. Memprioritaskan diklat teknis dan fungsional	1. Penetapan kebijakan diklat	1. Melakukan pengkajian diklat yang ada 2. Melakukan studi banding 3. Menetapkan kebijakan diklat
				1. Terwujudnya pengembangan kurikulum program diklat	1. Mengacu kepada analisis kebutuhan diklat (TNA)	1. Penyusunan standar program diklat	1. Mengidentifikasi diklat yang dibutuhkan 2. Menentukan tujuan umum diklat 3. Menentukan tujuan khusus diklat 4. Menentukan persyaratan peserta 5. Menentukan tata tertib 6. Menentukan klasifikasi pengajar 7. Menentukan syarat kelulusan 8. Menentukan syarat tatacara evaluasi diklat 9. Menentukan jenis mata pelajaran dan jamat 10. Menentukan bahan ajar
				c. Terwujudnya standar program diklat	1. Melakukan kerjasama dengan unit penguna 2. Mengoptimalkan peran indyaiswara	pengembangan kurikulum program diklat	1 Menyusun kurikulum baru 2 Mengembangkan bahan ajar

No.	Visi	Misi	TUJUAN	SASARAN	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					Kebijakan	Program	Kegiatan / Aktivitas
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Meningkatkan pelaksanaan program diklat termasuk program diploma	a. Terselenggaranya diklat prajabatan	Mengacu kpd peraturan perundang-undangan yang berlaku	penyelenggaraan diklat prajabatan	Menyelenggarakan diklat prajabatan gol. I dan II
				b. Terselenggaranya diklat dalam jabatan	Mengacu kpd peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyelenggaraan diklat dalam jabatan	1. Menyenggarakan diklat dalam jabatan 2. Mengevaluasi penyelenggaraan diklat
				c. Terselenggaranya Perguruan Tinggi Kedinasan	Mengacu kpd peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kedinasan	Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kedinasan
				d. Terselenggaranya diklat dengan program khusus	Mengacu kpd peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyelenggaraan diklat dengan program khusus	Menyelenggarakan diklat dalam jabatan
		PENINGKATAN Mengembangkan tradisi pengkajian di bidang pendidikan dan petathan yang dapat diandalkan.	1. Membangun sistem pengkajian diklat	Terwujudnya unit pengkajian SDM	Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan unit Eselon I di lingkungan Depkeu	Pembentukan unit pengkajian (Assesment Centre)	1. Membentuk Assesmet centre 2. Menyusun sistem assesment centre 3. Mensosialisasikan assesment centre 4. Melaksanakan assesment centre
			2. Membentuk unit pengkajian pengembangan SDM	Terwujudnya unit pengkajian pengembangan SDM			

No.	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					Kebijakan	Program	Kegiatan / Aktivitas
1	2	3	4	5	6	7	8
		ORGANISASI BELAJAR senantiasa memperbaiki diri melalui proses organisasi belajar (learning organization) sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan lingkungan eksternal	1. Meningkatkan kualitas SDM BPLK	a. Terwujudnya kelengkapan SDM BPLK pada diklat di dalam maupun di luar BPLK b. Terwujudnya kelengkapan SDM BPLK pada pengkajian publik di bidang keuangan negara c. Terwujudnya kelengkapan SDM BPLK pada pengembangan non diklat	memberikan kesempatan yg adil untuk mengikuti diklat yg dikaitkan dengan pengembangan karir SDM BPLK	Pengiriman SDM BPLK untuk mengikuti diklat baik di dalam maupun di luar BPLK	1. menentukan jenis diklat yang diperlukan 2. menentukan dan menyeleksi calon peserta diklat 3. mengirim peserta diklat
					memberikan kesempatan SDM BPLK terutama widyaiswara dalam pengkajian publik di bidang keuangan negara	pengkajian kebijakan publik di bidang keuangan negara oleh SDM BPLK	1. memberikan kelompok studi 2. mengaitkan SDM BPLK untuk menjadi anggota kelompok studi 3. melaksanakan pengkajian 4. mempublikasikan hasil setiap kelompok studi sebagai masukan bagi pimpinan Dep-Keuangan dan atau sebagai bahan ajar
					memberikan kesempatan yg adil untuk mengikuti pengembangan non diklat yang dikaitkan dengan pengembangan karir SDM BPLK	pengiriman SDM BPLK untuk mengikuti program pengembangan non diklat	1. Mengikutsertakan SDM BPLK dalam : a. tugas-tugas khusus b. studi banding dg lembaga lain 2. memberikan kesempatan SDM BPLK berakses pada informasi antara lain melalui : a. internet b. jurnal c. buku ilmu pengetahuan mudakir 3. memberikan tugas kepada SDM BPLK untuk melakukan bedah buku/menghadiri bedah buku 4. memberikan tugas kepada SDM BPLK sebagai fasilitator

No.	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					Kebijakan	Program	Kegiatan / Aktivitas
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Memberdayakan dan menyempurnakan organisasi	a. Terwujudnya analisis jabatan b. Terwujudnya struktur organisasi sesuai dengan peraturan per-u-an dan memadai	Menyusun/analisis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyusunan analisis jabatan	1. Menyusun prosedur kerja 2. Menyusun beban kerja 3. Menyusun uraian dan spesifikasi jabatan 4. Menata kembali SDM
			3. Meningkatkan sarana dan prasarana	a. Terwujudnya standar sarana dan prasarana di Pusdiklat/ STAN dan BDK b. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar	Menyusun/menyempurnakan struktur organisasi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku Memakai/mengacu kepada unit-unit diklat yang telah menerapkan standarisasi baik secara nasional maupun internasional. Memprioritaskan Balai Diklat Keuangan sebagai tempat penyelenggaraan diklat	Penyusunan standar sarana dan prasarana di Pusdiklat/STAN dan Balai Diklat Keuangan Pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar	1. Merumuskan standar sarana dan prasarana 1. Mengadakan sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
		SOSIAL berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat yang sadar keuangan negara	1. berperan serta dalam mengembangkan standar program dan pengembangan diklat keuangan negara bagi masyarakat 2. Berperan serta memberikan informasi keuangan negara pada masyarakat	a. Tersusunnya sistem pembelajaran tentang keuangan negara kepada masyarakat b. Terwujudnya masyarakat yang mendukung keuangan negara	menyusun sistem pembelajaran keuangan negara kepada masyarakat mengadakan kerjasama dengan Depedagri, Bepem, TVRI, TV swasta		